

## **KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH DAN KeadILAN DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DIKOTA SUNGAI PENUH**

**NENO IRAWAN, S.A.P<sup>1</sup>,  
BADRIZAL, S.Sos., MSi<sup>2</sup>, MASNON, S.E., MSi<sup>3</sup>**

STIA Nusantara Sakti Sungai Penuh

Email :

[nenoirawan@gmail.com](mailto:nenoirawan@gmail.com)

[mason17@gmail.com](mailto:mason17@gmail.com)

[badrizal@gmail.com](mailto:badrizal@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*Phenomena that occur in the field, namely, lack of community involvement in government, such as prioritizing interested parties rather than society in terms of planning and development processes. In the regional autonomy and justice policies the government is less effective and efficient in running the government in Sungai Penuh City. In the regional autonomy policy, the government still prioritizes rights over obligations, such as doing work safely without the desire to innovate and a lack of justice in running the government. The formulation of the research problem, namely, How is the Regional Autonomy and Justice Policy in Realizing Good Governance in Sungai Penuh City? The research objective is to determine the Regional Autonomy Policy and Justice in Realizing Good Governance in Sungai Penuh City. This research uses a qualitative approach where data is obtained through field interview guides to 6 informants referring to 5 research indicators, namely 1. Freedom 2. Participation 3. Effectiveness and efficiency 4. Providing mandatory fulfillment which is a right in human life 5. Prioritizing rights rather than obligation. The data obtained in the field were analyzed based on the classification of the informants' answers which were described in the results and research discussions which were then carried out by the interpreter of the researcher. It is known that the Regional Autonomy and Justice Policy in Realizing Good Governance in Sungai Penuh City that regional autonomy and justice policies have been implemented well in the administration of Sungai Penuh City. For this reason, the authors suggest that regional autonomy and justice policies in realizing good governance can continue to be improved in order to form good guidelines.*

**Keywords: Policy, Regional Autonomy, Good Governance**

## ABSTRAK

*Fenomena yang terjadi dilapangan yaitu, Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, seperti lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkentingan dari pada masyarakat dalam hal perencanaan dan proses pembangunan. Dalam kebijakan otonomi daerah dan keadilan pemerintah kurang efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Dalam kebijakan otonomi daerah pemerintah masih lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, seperti melakukan pekerjaan secara aman tanpa ada keinginan untuk melakukan inovasi dan kurangnya keadilan dalam menjalankan pemerintahan. Rumusan masalah penelitian yaitu, bagaimanakah Kebijakan Otonomi Daerah Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Sungai Penuh? Tujuan penelitian yaitu, Untuk mengetahui Kebijakan Otonomi Daerah Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Sungai Penuh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dimana data diperoleh melalui pedoman wawancara dilapangan kepada 6 orang informan yang mengacu kepada 5 indikator penelitian yaitu 1. Kebebasan 2. Partisipasi 3. Efektifitas dan efisinesi 4. memberikan pemenuhan wajib yang merupakan hak dalam hidup manusia 5. Lebih mengutamakan hak daripada kewajiban. Data yang diperoleh dilapangan dianalisis berdasarkan pengklasifikasian jawaban informan yang diuraikan dalam hasil dan pembahasan penelitian yang kemudian dilakukan interpretatif peneliti. Diketahui bahwa Kebijakan Otonomi Daerah Dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance di Kota Sungai Penuh bahwa kebijakan otonomi daerah dan keadilan sudah terlaksana dengan baik pada pemerinahan Kota Sungai Penuh. Untuk itu penulis menyarankan agar kebijakan otonomi daerah dan keadilan dalam mewujudkan good governance dapat terus ditingkatkan agar dapat membentuk peemrinathan yang baik.*

**Kata Kunci : Kebijakan, Otonomi Daerah, Good Governance**

## I. PENDAHULUAN

Di era otonomi saat ini, upaya untuk tetap mengandalkan bantuan dari pemerintah pusat atau tingkatan pemerintahan yang lebih tinggi sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Otonomi menuntut kemandirian daerah diberbagai bidang termasuk kemandirian didalam mendanai dan pelaksanaan pembangunan di daerahnya. Oleh karena itu, daerah dituntut agar berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Pemberlakuan Undang-Undang tersebut menambah kewenangan yang dimiliki daerah, maka tanggung jawab yang diemban oleh pemerintah daerah juga akan bertambah banyak.

Kebijakan otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*). Kebijakan tentang otonomi daerah

memberikan otonomi atau wewenang yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten.

Pemberian wewenang dan tanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2005 tentang otonomi daerah, harus diimbangi dengan pembagian sumber-sumber pendapatan yang memadai yang mampu dan mendukung pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan.

Implikasi dari adanya kewenangan urusan pemerintahan yang begitu luas yang diberikan kepada daerah dalam rangka otonomi daerah, dapat merupakan berkah bagi daerah, namun pada sisi lain bertambahnya kewenangan daerah tersebut sekaligus juga merupakan beban yang menuntut kesiapan daerah untuk melaksanakannya, karena semakin bertambahnya urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

Dalam pelaksanaannya, otonomi daerah merupakan desentralisasi sebagian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk dilaksanakan menjadi urusan rumah tangganya sendiri. Pemberian otonomi kepada daerah haruslah didasarkan kepada faktor-faktor yang dapat menjamin daerah yang bersangkutan mampu mengurus rumah tangganya.

Setelah adanya masa otonomi daerah perubahan politik mulai dikenal secara luas, seiring dengan itu hasrat untuk menciptakan suatu kehidupan iklim politik yang lebih sehat, lebih demokratis, dan transparansi. Dalam konteks otonomi daerah cenderung menafsirkan perubahan itu sebagai pembaharuan politik. Dalam konteks ini pembaharuan mengandung makna sebagai proses menata kembali kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan masyarakat.

Terminologi pembaharuan (reformasi) mengandung pengertian menegakkan kembali prinsip-prinsip yang sejak semula memang harus tegak. Gerakan reformasi di pasca Orde Baru diharapkan dapat memberikan pengaruh bagi penyelesaian berbagai persoalan bangsa dan negara Republik Indonesia; seperti kasus korupsi, nepotisme dan kolusi. Berbagai kasus menyangkut penyalahgunaan kekuasaan dan jabatan yang dilakukan oleh elite-elite politik dan birokrasi Orde Baru diyakini merupakan salah satu faktor penyebab yang memperparah krisis ekonomi di Indonesia. Masyarakat (*public*) mengharapkan dengan adanya reformasi, akan diikuti pula restrukturisasi dan reposisi desain kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, baik menyangkut dimensi kehidupan politik, sosial, ekonomi, maupun kultural.

Perubahan struktur, kultur dan paradigma birokrasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sangat mendesak untuk segera dilakukan mengikat birokrasi mempunyai kontribusi yang besar terhadap terjadinya krisis multi dimensional yang tengah terjadi sampai saat ini. Seperti kita ketahui bersama dengan pemberian otonomi kepada daerah, maka azas penyelenggaraan pemerintah daerah akan selalu menampilkan dua pertimbangan utama, yakni pertimbangan yang berkenaan upaya menjamin kesinambungan dan keberhasilan pembangunan nasional dan pertimbangan untuk mewartakan aspirasi masyarakat di daerah, agar mereka dapat lebih diberdayakan terutama untuk menunjang pembangunan daerah.

Masyarakat di daerah akan lebih mandiri dan tidak tergantung kepada bantuan pemerintah. Paradigma pemberdayaan masyarakat (*society empowerment*) bertumpu pada suatu pemikiran; pembangunan akan berjalan dengan sendirinya apabila masyarakat diberi hak untuk mengelola sumber daya alam yang mereka miliki dengan kemampuan sendiri dan menggunakannya untuk pembangunan masyarakatnya. Namun yang kemudian menjadi pertanyaan besar adalah; Sudah efektifkan pola kebijakan otonomi daerah yang diterapkan oleh pemerintah pusat pada daerah? Bagaimanakah nilai-nilai keadilan Pada penyelenggaraan pemerintah modern, umumnya kebijakan negara dibuat oleh institusi pemerintah atau negara yang juga berperan sebagai pelaksana dari kebijakan yang dibuatnya.

Dalam kaitan inilah maka mudah dipahami bahwa kebijakan itu acapkali diberi makna sebagai tindakan politik yang dilakukan oleh pemerintah dalam menjalankan misi pemerintahannya, karena kebijakan itu sesungguhnya merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok atau suatu organisasi dalam lingkungan tertentu dalam mencapai tujuan yang ditetapkan.

Dengan demikian kebijakan pemerintah adalah serangkaian keputusan yang saling berkaitan yang diambil oleh seseorang atau sekelompok aktor politik berkenaan dengan tujuan yang dipilih beserta cara untuk mencapainya dalam suatu situasi. Keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas kewenangan kekuasaan dari aktor tersebut.

Pada prinsipnya setiap daerah mempunyai suatu tatanan organisasi atau pemerintahan yang berwenang untuk merumuskan dan melaksanakan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh penduduk didalam wilayahnya. Keputusan-keputusan ini antara lain berbentuk undang-undang dan peraturan-peraturan lain. Begitu juga halnya dengan Kota Sungai penuh yang merupakan daerah pemekaran baru dari Kabupaten Kerinci. Tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang harus dibuat untuk membangun daerah Kota Sungai Penuh menjadi daerah yang maju dengan adanya otonomi daerah ini.

Pemerintah Kota Sungai penuh dituntut untuk dapat melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan dalam mewujudkan *good governance* atau pemerintahan yang baik melalui sekretariat daerah, apakah semua itu sudah tercapai? Disini berdasarkan survey awal diindikasikan bahwa fenomena yang terjadi dilapangan yaitu:

1. Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan, seperti lebih mengutamakan pihak-pihak yang berkentingan dari pada masyarakat dalam hal perencanaan dan proses pembangunan.
2. Dalam kebijakan otonomi daerah dan keadilan pemerintah kurang efektif dan efisien dalam menjalankan pemerintahan di Kota Sungai Penuh. Seperti kurangnya perhatian kepada masyarakat bawah secara ekonomi.

3. Dalam kebijakan otonomi daerah pemerintah masih lebih mengutamakan hak dari pada kewajiban, seperti melakukan pekerjaan secara aman tanpa ada keinginan untuk melakukan inovasi dan kurangnya keadilan dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan fenomena diatas maka penulis tertarik untuk melakukan peneliandengan judul **“Kebijakan otonomi daerah dan keadilan dalam mewujudkan *good governance* di Kota Sungai Penuh.”**

## II. METODE PENELITIAN

### Pendekatan Penelitian

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif menurut Lexy J.Moleong (2009: 21) yaitu meneliti suatu objek penelitian dengan mengkaji secara keseluruhan dan mendalam bukan melihat hubungan dua variabel atau lebih. Dimana hasil penelitian akan diolah berdasarkan interpretatif peneliti dan diuraikan dalam bentuk deskriptif.

### Informan Penelitian

Mengacu pada tujuan penulisan ini yakni untuk mengetahui kebijakan otonomi daerah dan keadilan dalam mewujudkan *good gernance* di kantor sekretariat Kota Sungai Penuh. Peneliti menggunakan informan kunci dan biasa berdasarkan tingkat kejenuhan yang akan diperoleh dalam penelitian nantinya yang akan diwawancarai dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh data dilapangan.

Metode penarikan informan adalah merupakan teknik pengambilan sampel untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian. Sugiono, (2007:91). Dalam penelitian kualitatif proses sampling yang terpenting adalah bagaimana menentukan informan kunci atau situasi sosial tertentu yang sarat informasi sesuai dengan fokus penelitian. Bugin, (2003:53). Pemilihan informan diperoleh secara purposife sampling yaitu sampel yang diambil secara sengaja yang dianggap betul-betul memiliki kapasitas dan memiliki wewenang dan memahami permasalahan penelitian ini, yaitu yaitu Sekretaris Daerah, Asisten I dan Kabag Pemerintahan daerah Kota Sungai Penuh.

Dalam menentukan informan yang akan dipakai dalam suatu penelitian, ada lima kriteria untuk pemilihan informan yaitu :

1. Subjek yang telah cukup lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau aktifitas yang menjadi informasi;
2. Subjek yang masih terlibat secara penuh/aktif pada lingkungan atau kegiatan yang menjadi perhatian peneliti;
3. Subjek yang mempunyai cukup banyak waktu atau kesempatan untuk diwawancarai;

4. Subjek yang dalam memberikan informasi tidak cenderung diolah atau dipersiapkan terlebih dahulu;

Subjek sebelumnya tergolong masih “asing” dengan penelitian, sehingga peneliti merasa tertantang untuk belajar sebanyak mungkin dari subjek yang berfungsi sebagai “guru baru” bagi peneliti.

### **Data Yang Akan Diambil**

Untuk keperluan penelitian ini, adapun data yang penulis ambil adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian langsung ke lapangan atau ke tempat penelitian melalui wawancara agar data yang didapatkan tepat dan benar melalui pemerintahan daerah di kantor sekretariat Kota Sungai Penuh.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen, arsip-arsip dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, yang dapat menunjang penelitian dengan melihat relevansinya dengan permasalahan penelitian.

#### **1.8.4. Teknik Pengumpulan Data Yang Digunakan**

##### **1. Penelitian Perpustakaan (*Library Research*)**

Penelitian ini untuk mendapatkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dilapangan melalui literatur-literatur ataupun referensi-referensi, untuk mencari landasan teori yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, serta buku-buku yang menunjang proposal penelitian ini.

##### **2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)**

Penelitian ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara turun langsung ke objek yang di teliti untuk mendapatkan data primer dengan cara:

##### **1. Wawancara (*interview*)**

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang melakukan percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab. Danim, (2002:130). Wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sugiyono, (2007:222).

##### **2. Observasi (*observation*)**

Observasi yang dilakukan yaitu dengan cara pengamatan tidak berperan serta, dimana pengamat hanya melakukan satu fungsi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti Lexy J. Meleong, (2009 :186). Sedangkan menurut Moh. Nazir. (2005:68), observasi yaitu cara pengumpulan data menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

#### **Unit Analisis**

Yang menjadi unit analisis dalam penelitian ini adalah Asisten I, Kabag organisasi, Kasubbag Tata Usaha, Staf Pelaksana dan Staf Tapem di Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh.

#### **Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh dilapangan dan diolah dengan menggunakan interpretatif peneliti untuk mengolah data mentah yang relevan

yang diperoleh dilapangan kemudian hasil penelitian diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka-angka atau data statistik.

Menurut Miles dalam Emzir (2010 : 129)

Analisa data ada tiga cara yaitu :

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih ,memokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat diverifikasi. Data kualitatif dapat direduksi dan ditransformasikan dalam banyak cara yaitu melalui seleksi halus, melalui rangkuman atau parafrase.

b. Model data (data display)

Langkah kedua dari kegiatan analisis data merupakan model data. Model (display) dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda dari pengukuran bensin, surat kabar , sampai layar computer. Melihat sebuah tanyangan membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu-analisis lanjutan atau tindakan didasarkan pada pemahaman tersebut.

Bentuk yang paling sering dimodel data kualitatif selama ini adalah teks naratif. Manusia tidak terlalu kuat sebagai pemroses dari sejumlah besar informasi, tendensi kognitif merupakan mereduksi informasi yang komplek kedalam berbagai gestalt yang dipilih atau konfigurasi-konfigurasi yang mudah dipahami. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan.

Merancang kolom dan baris dari suatu matrik untuk data kualitatif dan menentukan data yang mana, dalam bentuk yang mana, harus dimasukkan kedalam sel yang mana merupakan aktivitas analisis.

c. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Langkah ketiga dari aktivitas analisis merupakan penarikan dan berifikasi kesimpulan. Kesimpulan akhir tergantung pada ukuran korpus dari catatan lapangan, penyimpangan, dan metode-metode perbaikan yang digunakan tuntutan dari penyandang dan tetapi kesimpulan bahkan ketika seorang menyatakan telah memproses secara induktif.

Untuk menjaga validitas data maka dilakukan triangulasi baik terhadap data, sumber maupun metode.

a. Triangulasi sumber, dilakukan dengan cara :

1. Pengecekan data dan membandingkan fakta dengan sumber lain, sumber tersebut berupa informan yang berbeda.
2. Membandingkan data dengan memasukkan kategori informan yang berbeda.

b. Triangulasi data, dilakukan dengan cara :

Meminta umpan balik dari informan, umpan balik tersebut berguna untuk memperbaiki kualitas data dan kesimpulan yang ditarik dari data tersebut.

- c. Triangulasi metode, dilakukan dengan cara :  
Menggunakan beberapa metode yaitu dengan wawancara mendalam dan observasi dengan menelaah data sekunder.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Kebijakan Otonomi Daerah Dan Keadilan Dalam Mewujudkan *Good Governance* di Kota Sungai Penuh.**

Dalam penelitian ini dilakukan pengambilan data lapangan dengan menggunakan pedoman wawancara dengan 6 orang informan di Sekretariat Daerah Kota Sungai Penuh dari tanggal 1 sampai tanggal 17 September 2020 kemudian data diuraikan berdasarkan urutan indikator dari setiap informan, setelah itu dilakukan kesimpulan berdasarkan interpretatif dari peneliti pada setiap indikator penelitian.

#### **Operasional Variabel**

Dalam penelitian ini menelaah tentang kebijakan otonomi daerah dan keadilan. Dimana kerangka penelitian kebijakan otonomi daerah diambil menurut Syamsuddin Haris (2007:68), Otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yang dijadikan sebagai indikator penelitian yaitu:

1. Kebebasan  
Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.
2. Partisipasi  
Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.
3. Efektivas dan efisiensi  
Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisiensi).

Sedangkan untuk keadilan diambil dari pendapat Prof. Notonagoro (2016: 162) yaitu:

1. Adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak hidup manusia.  
Pemenuhan wajib setiap individu merupakan hal yang mendasar yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat mengutamakan kewajiban seperti kewajiban untuk membela negara hak azasi baik dari segi kehidupan yang layak dan pendidikan serta kehidupan lainnya.
2. Lebih mengutamakan wajib dari pada hak.  
Setiap warga negara yang terikat dengan aturan berkewajiban mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu

#### **Kerangka Pemikiran**

Dalam penelitian ini menelaah tentang kebijakan otonomi daerah dan keadilan. Dimana kerangka penelitian kebijakan otonomi daerah diambil menurut Syamsuddin Haris (2007:68), Otonomi daerah memiliki beberapa nilai dasar yang dijadikan sebagai indikator penelitian yaitu:

1. Kebebasan

Kebebasan masyarakat dan pemerintah daerah dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama.

2. Partisipasi

Masyarakat berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan publik di daerahnya.

3. Efektivas dan efisiensi

Melalui kebebasan dan partisipasi masyarakat, jalannya pemerintahan akan lebih tepat sasaran (efektif) dan tidak menghamburkan anggaran atau tidak terjadi pemborosan (efisiensi).

Sedangkan untuk keadilan diambil dari pendapat Prof. Notonagoro (2016: 162) yaitu:

1. Adanya pemenuhan wajib yang merupakan hak hidup manusia.

Pemenuhan wajib setiap individu merupakan hal yang mendasar yang menjadi kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat mengutamakan kewajiban seperti kewajiban untuk membela negara hak azasi baik dari segi kehidupan yang layak dan pendidikan serta kehidupan lainnya.

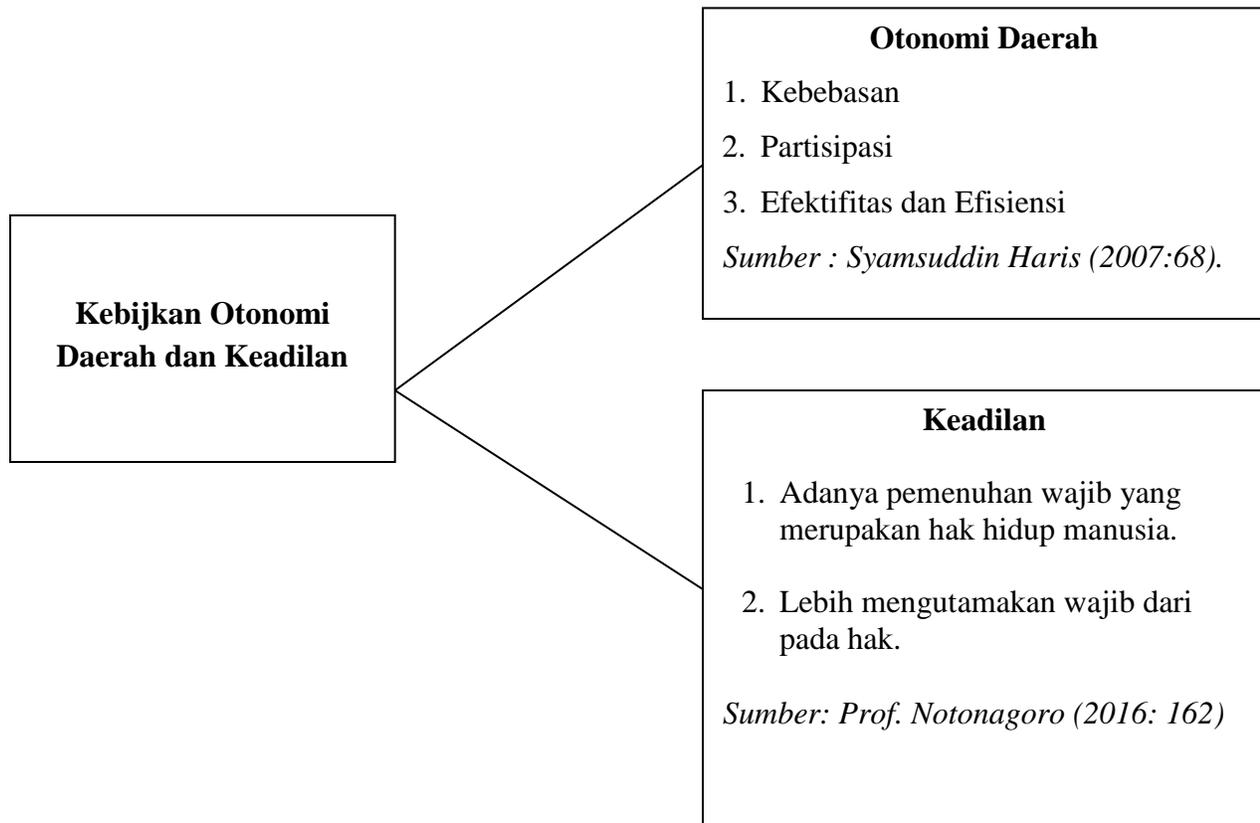
2. Lebih mengutamakan wajib dari pada hak.

Setiap warga negara yang terikat dengan aturan berkewajiban mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.1 dibawah ini.

**Gambar 1.1**

**Kerangka Pemikiran**



**IV. KESIMPULAN**

Dari uraian hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan otonomi daerah dan keadilan sudah dijalankan dengan baik oleh pemerintah yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan sehingga terwujudnya *good governance* yaitu :

1. Dapat disimpulkan bahwa Kota Sungai Penuh sudah menjalankan kebijakan otonomi daerah dimana masyarakat dan pemerintah daerah bersama-sama terlibat dalam mengambil tindakan dan kebijakan untuk memecahkan masalah bersama, seperti permasalahan keamanan dan pembangunan masyarakat Kota Sungai Penuh untuk mewujudkan *good goverance*.
2. Pemerintah Kota Sungai Penuh secara kebijakan otonomi daerah sudah menjalankan pemerintahan dengan melibatkan masyarakat dalam mengambil keputusan dalam proses

perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, dan pengawasan dalam kebijakan publik.

3. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama terlibat dalam kebijakan otonomi daerah dan keadilan demi perkembangan Kota Sungai Penuh dalam mewujudkan good governance
4. Kebijakan otonomi daerah dan keadilan pemerintah daerah Kota Sungai Penuh sudah dalam memenuhi kewajiban bagi setiap warga negara untuk dapat mengutamakan kewajiban seperti kewajiban untuk membela negara hak azasi baik dari segi kehidupan yang layak dan pendidikan.
5. Pemerintahan Kota Sungai Penuh dalam otonomi daerah dan keadilan sudah berupaya mewujudkan good governance dengan mengutamakan kewajiban daripada hak mereka sebagai pemerintah yang berwenang dalam menjalankan pemerintahan agar terwujudnya good governance.

## V. UCAPAN TERIMA KASIH

Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Murlinus, S.H., M.H selaku ketua STIA – NUSA Sungai Penuh
2. Bapak Badrizal, S.Sos., MSi selaku pembimbing utama dan Bapak Masnon, S.E., MSi selaku pembimbing pendamping yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan selama penulisan skripsi ini.
3. Bapak Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sungai Penuh dan staf yang menjadi informan dalam penelitian ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada peneliti.
4. Bapak/Ibu Dosen STIA – NUSA Sungai Penuh yang telah mendidik serta membagi ilmunya dengan penulis, sehingga sehingga ketahap penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan, waktu dan pengalaman yang penulis miliki. Akhir kata penulis mengharapkan saran serta kritikan yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini, sehingga dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bachrul, Elmi. 2002. *Keuangan Pemerintah Daerah Otonomi di Indonesia*. UIPres. Yogyakarta
- Barry Cushway. 2004. *Human Resource Management*. Elex Media. Computindo
- Bugin, B 2003, *Analisis Data Penelitian Kualitatif*, Rajawali Pers : Jakarta.
- Danim, Sudarwan. 2002, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia. Bandung
- Flippo Edwin. 2004. *Manajemen Personalia*. Edisi 6. Erlangga. Jakarta.
- Frederickson. 2010. *Administrasi Negara Baru*. LP3ES. Jakarta
- Fuady. 2007. *Teori-teori Keadilan Dalam Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung
- G.R. Terry. 2003. *Manajemen Sumber daya Manusia*. CV. Andi Karya. Jakarta
- Hanif Nurcholis. 2007. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi daerah*. Erlangga. Jakarta
- Harold Koontz and Weihrich, Heinz. 2006. *Human Resource Maajemen*, McGraw-Hill Irwin
- Hernan Toni. 2015. *Kebijakan Otonomi Daerah dan Keadilan Dalam Mewujudkan Good Governance*. Jurnal TAPIs. Volume 7 No. 12. Jauari-Juni 2015
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Edisi kedua. Balai Pustaka. Jakarta
- Kaho Josef Riwu. 2005. *Prospek Otonomi daerah di Negara Indonesia*. Rajawali Citra. Jakarta
- Lexy J. Moleong. 2009. *Metode Penelitian Kualitatif*. Erlangga. Jakarta
- Mannulang, 2004, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Audi Offset, Jogyakarta.
- Mardiasmo. 2002 *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Era Otonomi Daerah : Harapan yang Belum Menjadi Nyata*. Yogyakarta, Vol. XI.
- Miles dan Emzir, 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Moh Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta
- Notohamidjojo. 1973. *Demi Keadilan dan Kemanusiaan*. Balai Pustaka. Bandung
- Prof. Notonegoro. 2016. *Dasar Falsafah Negara*. CV. Pantjatan Cahya. Jakarta
- Priyono. 2003. *Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik*. CV. Haji Mas Agung Jakarta

- Soekanto. 2007. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru. Rajawali Pers. Jakarta
- Soekidjo Notoatmodjo. 2002. *Pengembangan Manajemen Sumber daya Manusia*. PT Ranika. Jakarta
- Sugiyono. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Penerbit Rineka
- Sumarsono. 2003. *Human Resources* jilid II. Penerbit Erlangga.
- Syamsuddin Haris. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Grafika Aksara. Jakarta
- The Liang Gie. 2002. *Asas-azas Manajemen*. Mandar Jaya. Bandung
- Thoha. Miftah. 2005. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Prenata Media. Jakarta
- T.Hani Handoko. 2003. *Manajemen*. BPFEE. Yogyakarta
- Winarno Suryo. 2002. *Good Governance :Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi*. Surabaya. Insan Cendekiawan.
- Winarya Surya Adisubrata. 2002. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Rhineka Cipta. Jakarta
- Peraturan Perundangan-undangan Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara pemerintah daerah Propinsi dan Pemerintah daerah Kota/Kabupaten
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah